

Gambaran Isu dan Kebijakan Lembaga PAUD di TK Negeri Tapus Kabupaten Lebong

Ulya Rahmanita¹

ulyarahmanita@gmail.com

Vevi Asri Lestari²

veviasrilestari@gmail.com²

Ali Akbarjono³

aliakbarjono@iainbengkulu.ac.id³

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Received: May 25th 2021

Accepted: July 28th 2021

Published: July 29th 2021

Abstrak: Pendidikan Anak Usia Dini merupakan satu dari tahap pendidikan yang harus diperhatikan, karena berperan menentukan perkembangan dan keberhasilan anak di masa mendatang. Namun sayangnya, TK Negeri Tapus yang merupakan satu-satunya TK di kecamatan Topos kabupaten Lebong ini masih kurang diminati oleh masyarakat disana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PAUD dan karena beberapa permasalahan yang ada di dalam lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengungkap gambaran isu dan permasalahan yang ada di TK Negeri Tapus. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh beberapa gambaran isu seperti (1) sarana dan prasarana yang sangat kurang dan mengancam keselamatan dan kesehatan anak; (2) kurikulum 2013 yang sulit dipahami dan tidak dapat dikembangkan oleh guru; (3) sistem pembelajaran selama pandemi yang tidak dapat dilakukan secara daring; dan (4) isu manajerial seperti kurangnya tenaga SDM sehingga guru masih melakukan rangkap jabatan. Isu-isu ini perlu diatasi melalui internal lembaga seperti menyediakan sarana dan prasarana yang layak serta pelatihan untuk guru mengenai kurikulum, keahlian, dan kreativitas sebagai tenaga pendidik, maupun dari luar lembaga seperti dilakukan pembinaan dari Diknas setempat.

Kata Kunci: pendidikan anak usia dini, isu dan kebijakan, lembaga PAUD.

How to cite this article:

Rahmanita, U., Lestari, V. A. & Akbarjono, A. (2021). Gambaran Isu dan Kebijakan Lembaga PAUD di TK Negeri Tapus Kabupaten Lebong. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 6(2), 120-130. doi:<https://doi.org/10.33369/jip.6.2.120-130>

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini (PAUD) dewasa ini telah menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia. Pendidik PAUD sendiri dituntut untuk merancang dan melaksanakan tugas yang sangat mulia yaitu mendampingi anak dalam melewati usia emas (*golden age*) dan membantu mereka

memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya agar berjalan secara optimal dan maksimal. PAUD merupakan satu dari tahap pendidikan yang harus diperhatikan, karena berperan menentukan perkembangan dan keberhasilan anak di masa mendatang. Dengan adanya PAUD, anak diharapkan akan tumbuh dan berkembang dengan identitas

diri yang kuat, cerdas intelektual dan menjadi individu yang siap menghadapi dunia global (Noorlaila, 2010; Akbarjono, 2015).

Pendidikan anak usia dini sudah lebih dikenal dan akrab di masyarakat, para orang tua pun mulai menyadari pentingnya pendidikan yang dilakukan sejak usia dini, hal ini terlihat dengan semakin banyak lembaga pendidikan anak usia dini yang menjamur di suatu daerah dan diisi dengan jumlah anak yang juga tidak sedikit. Keberadaan PAUD ini sejalan dengan lahirnya kebijakan pemerintah berupa undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang kebijakan perlindungan anak dan pasal 28 UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta ditandai dengan terbentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Namun, ternyata jauh sebelumnya, kesamaan hak mendapatkan pendidikan tersebut telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dimana terdapat salah satu pernyataan yang berbunyi bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencerdaskan anak bangsa (Istiqomah, 2016). Hal ini membuktikan bahwa negara tentu harus mengambil alih memperhatikan pendidikan anak usia dini.

Melalui berbagai bentuk dan kesepakatan di atas, telah mendorong pemerintah untuk menyusun berbagai program yang terkait dengan pengasuhan, pendidikan dan pengembangan potensi dan karakteristik anak usia dini. Sebagai wujud nyata komitmen, dimuatnya dokumen Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang isinya antara lain mewujudkan anak yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas serta jangkauan upaya kesehatan, peningkatan sumber daya, pembiayaan dan manajemen kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta mewujudkan perlindungan dan partisipasi

aktif anak melalui perbaikan mutu pranata sosial dan hukum, pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan terutama bagi anak yang berada dalam keadaan darurat dalam jaringan kerja nasional dan internasional (Latif, 2014).

Selain itu, dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan PAUD, berbagai kebijakan juga dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari sistem perundang-undangan, sampai dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional, seperti kualifikasi guru, kurikulum, sistem pembelajaran serta syarat sarana dan prasarana dalam mendirikan lembaga PAUD. Hal ini cukup membuktikan komitmen Indonesia terhadap PAUD tampak jelas dengan masuknya PAUD dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah berupaya keras mewujudkan target tersebut dengan meluncurkan Gerakan PAUDISASI, Desa Satu PAUD, Bunda PAUD Nasional sampai Desa, dan bahkan sudah mulai merumuskan wacana Wajib PAUD bagi anak 5-6 tahun. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional dapat dianggap sebagai jaringan satuan pendidikan yang dihimpun secara terpadu dan dikerahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Akbarjono, 2015).

Sayangnya, meski berbagai program pemerintah terus dijalankan dan perhatian terhadap PAUD juga selalu diberikan, isu-isu permasalahan yang ada di PAUD terus ada dan terjadi di lapangan. Anam (2021) merangkum bahwa hingga saat ini terdapat banyak lembaga PAUD yang belum mampu mencapai tujuan pendidikan karena berbagai masalah atau problematika terjadi pada beberapa aspek, seperti permasalahan institusi, manajemen atau manajerial, kualitas kompetensi guru, penerapan evaluasi pembelajaran, pemanfaatan dan penerapan media pembelajaran, dll. Permasalahan-permasalahan tersebut masih ada dan relevan pada isu-isu yang dihadapi lembaga PAUD hingga saat ini, karena masih banyak ditemui dalam kasus yang serupa

dan seringkali cukup sulit untuk diatasi sehingga masalah tersebut terjadi dalam waktu yang cukup panjang.

Hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di TK Negeri Tapus di kecamatan Topos kabupaten Lebong provinsi Bengkulu, juga ditemukan isu-isu yang telah cukup lama dialami dan menurut tenaga pendidik cukup sulit untuk diatasi. Masalah tersebut diantaranya adalah minimnya sarana dan prasarana yang ada, sistem pembelajaran selama pandemi yang sulit dilakukan secara daring, sistem manajerial dimana guru merangkap jabatan lain dan kurikulum 2013 yang sulit diimplementasikan. Sarana dan prasarana yang minim ini meliputi tidak adanya toilet, pagar sekolah, dan lingkungan bermain *outdoor*. Padahal, idealnya pembelajaran pada anak usia dini dilakukan secara seimbang di dalam dan di luar ruangan serta memenuhi standar keamanan, kesehatan dan perlindungan peserta didik.

TK Negeri Tapus adalah satu-satunya TK yang terdapat di Kecamatan Topos, kabupaten Lebong yang memiliki 25 orang siswa, 1 kepala sekolah dan 4 orang tenaga pendidik. Menjadi satu-satunya TK di daerah tersebut, namun animo dan kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini tampaknya belum sepenuhnya dimiliki oleh para orang tua di daerah tersebut. Hal ini juga diakibatkan rendahnya Status Ekonomi Sosial (SES) dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TK Negeri Tapus juga mengakibatkan kurangnya daya tarik masyarakat Kecamatan Topos untuk menyekolahkan anak-anaknya di TK tersebut.

Di sisi lain, kesulitan lain yang berasal dari dalam lembaga seperti sulitnya menyesuaikan kurikulum, sistem manajerial dan sistem pembelajaran selama pandemi, menjadi permasalahan bagi lembaga TK Negeri Tapus di Kabupaten Lebong. Hal-hal tersebut menjadi isu yang patut diteliti

karena kualitas lembaga PAUD tentu memiliki peran yang penting dalam perkembangan anak. Anak yang mendapat program pengasuhan yang berkualitas di lembaga PAUD akan menunjukkan perilaku sosial yang baik dan lebih sedikit terlibat masalah perilaku serta berperan dalam kemampuan anak untuk mengontrol dirinya (Widiastuti, 2018). Isu pada suatu lembaga PAUD, khususnya di TK Negeri Tapus jika terus dibiarkan maka dapat menjadi hambatan lembaga tersebut untuk mencapai tujuan pendidikannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan agar dapat memperoleh pemahaman dan penafsiran yang relatif mendalam tentang makna dan fenomena yang ada di lapangan (Yeni dkk., 2020). Data pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama empat hari pada tanggal 14-17 juni 2021. Sumber datanya adalah kepala sekolah, beberapa guru yang terlibat langsung dalam pengajaran, dan wali murid. Wawancara dilakukan secara langsung dan juga melalui aplikasi *whatsapp*. Jenis pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan terbuka seputar permasalahan, keluhan dan keterbatasan yang dialami. Observasi dilakukan saat kunjungan ke sekolah dan pengamatan dilakukan langsung saat proses belajar mengajar dilaksanakan. Sedangkan, dokumentasi melibatkan data-data operasional, seperti data siswa, data sarana prasarana, data guru, dan data proses pembelajaran yang dimiliki sekolah. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah (1) reduksi data, yaitu menyederhanakan dan mengkategorisasikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga menghasilkan informasi yang bermakna, (2) dilakukan penyajian data dimana data disusun secara sistematis agar penarikan kesimpulan dapat lebih mudah dilakukan,

dan (3) dilakukan penyimpulan dan verifikasi dimana data hasil wawancara, observasi dan data-data dokumentasi dicari hubungan, persamaan dan perbedaannya untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi oleh TK Negeri Tapus tentu dapat menjadi hambatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan visi misi lembaga tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, maka ditemukan beberapa isu-isu atau permasalahan yang tampak dan menjadi perhatian baik dari dalam lembaga, maupun luar lembaga, diantaranya yaitu isu sarana dan prasarana, kurikulum, sistem manajerial dan sistem pembelajaran selama pandemi covid-19.

Isu Sarana dan Prasarana

TK Negeri Tapus memiliki 2 gedung belajar, namun hanya 1 gedung yang digunakan dalam proses pembelajaran, memiliki 1 buah kantor untuk kepala sekolah dan guru. Sedangkan untuk alat permainan yang dimiliki masing-masing berjumlah 1 unit yaitu perosotan, jembatan besi, dan ayunan yang diletakkan di dalam ruangan, karena sekolah ini belum memiliki taman bermain *outdoor*. Selain itu, siswa TK Negeri Tapus berjumlah 25 orang, namun meja siswa yang dimiliki hanya berjumlah 20 unit yang digunakan secara bersama-sama.

TK Negeri Tapus juga tidak memiliki toilet, baik untuk siswa maupun guru. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena toilet adalah hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga, karena sangat memengaruhi kebersihan dan kesehatan siswa, guru dan semua yang terlibat di dalam lembaga tersebut. Sekolah juga tidak memiliki pagar, padahal terletak di pinggir jalan raya, yang tentu akan membahayakan dan mengancam keamanan siswa jika luput dari pengawasan guru. Tidak hanya kekurangan sarana dan prasarana,

lingkungan TK ini pun terlihat kurang bersih dikarenakan teras sekolah sering digunakan sebagai tempat penitipan bahan bangunan masyarakat seperti semen, kayu, besi dan lain-lain.

Berdasarkan gambaran sarana dan prasarana di atas, tentu keadaan TK Negeri Tapus sangat perlu perhatian dan perbaikan dari segi keamanan, kebersihan dan kenyamanan. Padahal, salah satu syarat lembaga PAUD adalah diperlukannya sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang layak dan baik untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Anggraini dan Batubara, 2021). Tidak adanya keberadaan toilet, pagar, jumlah meja yang sesuai, serta kebersihan lembaga menunjukkan fakta di lapangan bahwa sarana dan prasarana yang sesuai dengan aturan belum sepenuhnya diterapkan. Keadaan ini tentu akan berpengaruh pada ketidaklayakan, ketidaknyamanan pada proses belajar mengajar, dan juga akan berdampak pada keengganan serta ketidakpedulian orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD (Anggraini dan Batubara, 2021).

Pengambil kebijakan di sekolah, seperti manajer atau kepala sekolah juga sangat perlu pemahaman tentang sarana dan prasarana yang akan membantu memperluas wawasan mereka tentang bagaimana mereka dapat merencanakan, menggunakan dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal guna mencapai tujuan pendidikan (Rosida dan Nurzaima, 2020). Pengelolaan sarana dan prasarana juga dilakukan untuk pengefisienan dan pengefektifan sehingga dapat dirawat untuk kebutuhan proses belajar (Binsa, 2021). Beberapa hal yang

dapat diperbaiki dan diperhatikan bagi TK Negeri Tapus sesuai dengan persyaratan dalam pendirian lembaga TK diantaranya yaitu menyediakan toilet untuk siswa dan guru yang di dalamnya terdapat jamban dengan air bersih serta mudah dijangkau oleh anak dan tetap dalam pengawasan guru, adanya fasilitas bermain untuk anak yang bertempat di dalam atau luar ruangan, menciptakan keamanan dan kenyamanan anak dengan menyediakan pagar yang sederhana namun kokoh, serta menciptakan lingkungan bermain dan belajar dengan bersih dan aman agar anak terhindar dari bahaya sisa bekas-bekas bahan bangunan yang sering ada di depan gedung TK.

Isu Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di TK Negeri Tapus adalah Kurikulum 2013. Kendalanya, kurikulum 2013 ini belum sepenuhnya bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sana, karena kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum 2013 sehingga mereka mengaku masih kebingungan dalam penerapannya. Belum lagi tidak didukungnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk menunjang kurikulum 2013 tersebut.

Menurut Permen 137 tahun 2014, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum PAUD 2013 merupakan perencanaan yang berkaitan dengan pengumpulan, pemilihan, dan analisis sejumlah informasi yang relevan dari berbagai sumber dan merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya agar anak siap untuk menghadapi kehidupan sekarang dan masa yang akan datang (Fitri dkk., 2017).

Kurikulum 2013 PAUD berorientasi pada pendekatan saintifik. Penyusunan isi kurikulum bersifat *unified* atau *concentrated curriculum*, yaitu pola penyusunan bahan

pembelajaran yang tersusun dari tema-tema pembelajaran dan di dalam tema tersebut mencakup materi berbagai bahan disiplin ilmu (Prihatini, 2014). Sasaran evaluasinya adalah perkembangan anak untuk menjadi manusia yang mandiri, dan lebih menekankan proses dibanding hasil (Rahelly, 2018). Guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum. Jika guru masih belum memahami penyusunan rancangan pembelajaran yang telah ditetapkan standar kurikulum, maka akibatnya pembelajaran tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan pendekatan saintifik tidak terjadi pada proses pembelajaran (Rahelly, 2018).

Kebingungan yang dialami oleh guru TK Negeri Tapus tentu dapat membuat proses belajar dan mengajar menjadi tidak efektif dan tujuannya menjadi kurang jelas. Maka dibutuhkan suatu pengembangan kurikulum sesuai dengan keadaan dan kondisi faktual dari lembaga TK tersebut. Kurikulum nasional yang sudah ditetapkan merupakan acuan minimal yang dapat dikembangkan oleh satuan PAUD di daerah sesuai dengan karakteristik, keunggulan dan potensi yang dimilikinya (Ndeot, 2019). Kurikulum Pendidikan Nasional juga memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan agar mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan kearifan lokal yang khas daerah setempat, dan mengedepankan potensi, minat, bakat perkembangan dan kebutuhan peserta didik (Leksono dkk., 2018).

Peluang guru dalam mengembangkan kurikulum 2013 pada saat menyusun KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dapat dengan cara mengimplementasikan pendekatan menyeluruh dan terpadu, ragam budaya, konstruktivisme dan bermain kreatif. Lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar anak juga dapat menjadi pertimbangan dan perhatian guru, membangun konstruktivisme dan bermain kreatif dengan memanfaatkan sarana

prasarana dan keadaan lingkungan di sekitarnya. Namun tentu tidak lupa pula dengan memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan anak yang menjadi subjek belajar.

Pengetahuan guru mengenai kurikulum 2013 tentu juga harus menjadi perhatian. Khususnya dikarenakan guru di TK Negeri Tapus hampir seluruhnya merupakan lulusan sarjana PAUD, sehingga pemahaman mengenai kurikulum 2013 dan pengembangannya perlu dipelajari lebih mendalam guna mencapai tujuan pendidikan. Menurut Budiman dan Riyanto (2013), pengetahuan berkaitan sangat erat dengan tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pendidikan seharusnya semakin luas pula pengetahuannya, meskipun hal tidak mutlak karena berbagai faktor lain dapat memengaruhi. Pelatihan-pelatihan juga dapat digunakan untuk menambah pengetahuan guru mengenai kurikulum 2013, begitu pula untuk pengembangan kurikulum, proses penilaian kurikulum dan peningkatan kerja guru (Noviana dkk., 2019).

Isu Sistem Pembelajaran Selama Pandemi Covid19

Memasuki tahun 2020 dunia dikejutkan dengan menyebarkan virus covid-19 yang menyebabkan beberapa kondisi, khususnya di sektor pendidikan mengalami perubahan besar. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah dilakukan secara daring, ataupun luring jika kondisinya yang sangat mendesak. Begitu pula di TK Negeri Tapus, kondisi pandemi covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi siswa, guru, maupun orang tua dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sesuai surat edaran pemerintah yang menginstruksikan sekolah dilaksanakan secara daring maupun luring, maka di TK Negeri Tapus awalnya tetap akan melaksanakan sistem pembelajaran secara daring, namun hal ini ditentang oleh orang tua siswa karena sarana dan prasarana dari siswa sendiri

kurang memadai. Akhirnya, sesuai kesepakatan guru dan orang tua siswa, maka ditetapkan sekolah dilakukan secara luring atau tatap muka, dengan siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A masuk pada hari senin, rabu dan jumat, sedangkan kelompok B masuk pada hari selasa, kamis dan sabtu. Jika sebelum pandemi proses kegiatan belajar mengajar berjalan dari pukul 08.00-10.00, namun karena pandemi waktu di sekolah dipersingkat menjadi pukul 08.30-09.30 setiap harinya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini sangat memberatkan berbagai pihak. Jika sekolah lain yang memiliki fasilitas cukup memadai dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, tidak halnya dengan TK Negeri Tapus. Fasilitas dan sumber daya manusia di daerah tersebut dirasa tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara daring, sehingga mereka tetap mengadakan sekolah tatap muka dengan berbagai risiko yang ada. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena anak-anak adalah salah satu populasi rentan yang berbahaya jika tertular virus covid-19, begitu pula dengan guru yang mengajar.

Sarana dan prasarana kegiatan juga tentu sangat berpengaruh terhadap kelancaran sistem pembelajaran daring tersebut. Tak heran banyak masyarakat yang bertempat di daerah terpencil minim akan pengetahuan teknologi maupun informasi-informasi terbaru. Tidak semua peserta didik tersebut juga memiliki perangkat elektronik, seperti peranti komunikasi berbasis android (gawai) dan perangkat lunak lainnya (komputer) dikarenakan keterbatasannya kebutuhan (Sakti, 2021). Selain itu upaya guru dalam mengontrol anak dari jarak jauh adalah sebuah keterbatasan, ditambah dengan adanya anak yang jarang dibimbing oleh orang tua dan juga kurangnya pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran dari rumah sebagian besar tidak terlaksana secara maksimal

(Satrianingrum dan Prasetyo, 2021). Hal ini pula yang dialami oleh TK Negeri Tapus sehingga memutuskan untuk tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka meski dengan waktu yang terbatas.

Keputusan pemerintah yang memberi kebijakan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara daring, tentu melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Oleh karena itu, seharusnya kepala sekolah atau guru TK Negeri Tapus dapat membuat suatu langkah yang lebih kreatif dan inovatif untuk menerapkan hal ini. Meski pembelajaran daring memang membutuhkan tanggung jawab, kemandirian dan ketekunan pribadi si anak, dan juga memerlukan peran orang tua untuk mendampingi saat proses belajar dilakukan di rumah (Novitasari dkk., 2021), guru juga harus memiliki suatu skenario dan rencana khusus, seperti membuat kurikulum selama pandemi namun dengan tidak melupakan kesehatan dan risiko-risiko yang mengancam anak. Beberapa kendala yang dialami dapat diatasi dengan melakukan *home-visit* secara terjadwal, membuat forum komunikasi dengan orang tua dan siswa (Sakti, 2021), serta selalu berinovasi dan memperbarui materi ajar yang dapat dilakukan secara daring maupun luring yang minim tatap muka.

Isu Manajerial

TK Negeri Tapus merupakan satu-satunya TK di kecamatan Topos Kabupaten Lebong, namun sekolah ini hanya memiliki satu orang kepala sekolah lulusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan empat orang guru lulusan S1 PAUD/PIAUD/TK. Selain menjadi pengajar/wali kelas dan pendamping, para guru juga merangkap jabatan lain seperti menjadi wakil kepala sekolah, sekretaris, bendahara maupun staf. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ada di TK tersebut.

Struktur organisasi di sekolah dibuat sebagai sebuah instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah yang sudah disepakati bersama dengan lebih efektif dan efisien (Nurmalasari dan Syah, 2019). Namun sayangnya fakta di lapangan seringkali tidak sesuai atau sulit dicapai dikarenakan tugas dan tanggung jawab ini tidak diberikan pada orang yang tepat. Kepala sekolah atau manajer sebagai seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program sekolah haruslah benar-benar memahami potensi dan kualifikasi dari masing-masing bawahannya.

Fenomena rangkap jabatan memang seringkali dialami di dalam lembaga pendidikan maupun di sektor lain, karena idealnya SDM lebih baik diberikan pekerjaan sesuai dengan keahliannya agar dapat fokus pada tanggung jawabnya masing-masing tanpa harus diganggu oleh pekerjaan lain. Namun, rangkap jabatan seringkali tidak bisa dihindari karena ada tuntutan pemenuhan jam belajar, ketidakmerataan kompetensi dan potensi guru, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang terbatas, serta guru memiliki keterampilan lain yang dibutuhkan untuk jabatan lainnya (Nurmalasari dkk., 2019; Nurmalasari dan Syah, 2019).

Guru yang merangkap jabatan menjadi tenaga administrasi dan lainnya pada dasarnya tetap dapat berjalan dengan baik selama lembaga mampu memberdayakan dan mengatur semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh SDM-nya, sebaliknya, jika rangkap jabatan ini tidak dapat dilakukan dengan baik, maka hasilnya akan berdampak negatif dan merugikan lembaga (Prasista dkk., 2017). Maka dari itu kepala sekolah atau manajer dapat menerapkan konsep *staffing* untuk mengatur hal tersebut.

Staffing merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota organisasi, memberikan pemahaman mengenai bidang-

bidang pekerjaan yang akan dilakukan dan penempatan tenaga-tenaga yang sesuai (Nurmalasari dan Syah, 2019). Proses *staffing* meliputi perencanaan SDM, pelaksanaan seleksi dan penarikan karyawan yang dibutuhkan, penempatan, pembinaan dan pengembangan serta pemberhentian pegawai. Dalam hal ini, manajer atau kepala sekolah TK Negeri Tapus perlu benar-benar memperhatikan potensi yang dimiliki oleh guru sebelum diberikan amanah untuk merangkap jabatannya, karena tidak semua orang mampu bekerja dengan tugas dan *jobdesk* yang cukup banyak diluar kemampuannya. Jika dirasa tenaga pendidik yang ada tidak dapat menangani salah satu jenis pekerjaan, diperlukan pertimbangan yang matang untuk menyeleksi ataupun menambah tenaga SDM baru di TK Negeri Tapus tersebut. Atau jika memang kesulitan untuk menerima SDM yang baru, hal seperti pelatihan, pembinaan dan pengembangan karyawan yang mengacu pada sistem karir dan prestasi kerja sangatlah dibutuhkan. Sistem karir meliputi kecakapan karyawan yang bersangkutan, pengalamannya dalam bekerja, kesetiaan pada organisasi atau lembaga, pengabdian dari segi lamanya waktu bekerja dan syarat objektif lainnya. Sedangkan, pada hasil prestasi kerja, dapat diperhatikan kecakapannya dan prestasi yang telah dicapai dalam bidang pekerjaan yang ditekuni. Prestasi ini ditunjukkan dengan suatu tanda lulus atau sertifikat kecakapan, contohnya sertifikat uji kompetensi, dll. (Nurmalasari dan Syah, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Gambaran isu-isu yang ada di TK Negeri Tapus merupakan beberapa gambaran fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan kebijakan ataupun syarat pendirian sebuah lembaga PAUD. Namun, TK ini tetap berdiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini di kecamatan

Topos kabupaten Lebong meski dengan berbagai isu dan rintangan tersebut. Isu-isu ini meliputi (1) sarana dan prasarana yang tidak menjamin keamanan dan kenyamanan anak, seperti tidak memiliki toilet, tidak memiliki pagar meski berlokasi di pinggir jalan raya, tidak ada aktivitas *outdoor* untuk anak dan bagian teras sekolah yang seringkali digunakan untuk menyimpan bahan bangunan yang dapat membahayakan anak; (2) kebingungan yang dialami oleh guru mengenai kurikulum 2013 karena tidak memahami isinya dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar; (3) sistem pembelajaran selama pandemi covid-19 yang tidak dapat dilakukan secara daring, karena tidak semua siswa memiliki gawai dan tidak semua wali siswa akrab dengan teknologi, sehingga TK Negeri Tapus masih melakukan pertemuan tatap muka dengan batasan waktu, namun hal ini menyalahi aturan pemerintah dan mengancam kondisi kesehatan siswa dan guru; (4) isu manajerial dari sedikitnya jumlah SDM sehingga banyak guru yang rangkap jabatan dan dikhawatirkan akan menurunkan performa mereka sebagai seorang tenaga pendidik.

Beberapa kondisi yang dapat dilakukan adalah perlunya kebijakan dan pemikiran yang kreatif serta inovatif bagi kepala sekolah dan guru TK Negeri Tapus untuk mendapatkan pelatihan mengenai kurikulum sehingga dapat menerapkan dan mengembangkannya sesuai dengan kondisi tempat TK tersebut berada, melakukan *home-visit* pada siswa dan membuat suatu kurikulum pandemi covid-19 yang lebih kreatif dan menarik agar anak tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar di rumah meski tanpa gawai (*gadget*), menyediakan sarana dan prasarana seperti toilet dan pagar yang meski sederhana, namun tetap dapat menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan anak. Selain itu, rangkap jabatan juga harus melalui pertimbangan agar tidak memberatkan guru dan lembaga, maka

diperlukan pelatihan dan pemahaman tugas atau *job desk* dengan jelas agar tanggung jawab antar jabatan tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain memperbaiki isu-isu dari dalam lembaga, diperlukan juga bantuan dari Dinas Pendidikan setempat dalam menangani hal tersebut, khususnya dari segi sarana prasarana, evaluasi kurikulum dan sistem pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Jika pihak sekolah berbenah untuk menyediakan sekolah yang lebih layak dan memiliki *branding* yang baik, tentu ini juga akan berdampak pada animo dan kepercayaan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini serta tertarik untuk menyekolahkan anaknya mulai dari usia dini, mengingat TK Negeri Tapus adalah satu-satunya TK di kecamatan Topos, dan merupakan sebuah TK Negeri yang memiliki tenaga pendidik yang cukup berkompeten.

Saran

Terdapat berbagai macam isu dan permasalahan yang dapat ditemui dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Beberapa wacana untuk melaksanakan sekolah tatap muka di tengah pandemi juga dapat menjadi polemik baru yang dapat diteliti lebih lanjut. Begitu pula dengan kesenjangan antara realita yang terjadi di lapangan yang seringkali berbeda dengan aturan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti sarana dan prasarana yang kurang layak, tingkat pendidikan guru yang tidak sesuai, penerapan evaluasi pembelajaran yang kurang menyeluruh dan hanya berfokus pada aspek kognitif saja, serta permasalahan-permasalahan lain yang dapat ditemui khususnya pada lembaga PAUD yang bertempat di daerah-daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarjono, A. (2015). Road Map Integrasi Revolusi Mental dan Capacity Building dalam Sistem Pendidikan Nasional. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam 14 (1)*. 70-91. Retrieved from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/attalim/article/view/262>.
- Anam, N. (2021, 06 Januari). *Berbagai problematika pendidikan dan pembelajaran di dalam lembaga pendidikan PAUD dan TK/RA di Indonesia*. Retrieved from <https://iaiq.ac.id/berbagai-problematika-pendidikan-dan-pembelajaran-di-dalam-lembaga-pendidikan-paud-dan-tk-ra-di-indonesia/>
- Anggraini, E. S., dan Batubara, L. F. (2021). Evaluasi Pemenuhan Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Usia Dini 7 (1)*, 20-26. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jud/article/view/25785>.
- Binsa, U.H. (2021). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di TK Pelangi Anak Negeri Yogyakarta. *Jurnal CARE 8 (2)*, 1-10, retrieved from <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/JPAUD>
- Budiman dan Riyanto, A. (2013). *Kapita Selekta Kuesioner: Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Fitri, A.E., dkk. (2017). Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Potensia (2) 1*, 1-13, DOI: <https://doi.org/10.33369/jip.2.1.1-13>.
- Istiqomah, L. (2016). Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan PAUD. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini 1 (1)* 57-66.

- Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/goldenage/article/view/1255/1155>
- Latif, M. (2014). *Orientasi Pendidikan Anak Usia Dini (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Kencana.
- Leksono, F.R., dkk. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 PAUD di TK TPI Nurul Huda Malang Kelompok A1. *JINOTEP 4 (2), 126-131*. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jinotep/article/view/4249>
- Ndeot, F. (2019). Pentingnya Pengembangan Kurikulum di PAUD. *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini 2 (1), 30-37*. Retrieved from <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jllpaud/article/view/335>
- Noviana, D., dkk. (2019). Tingkat Pengetahuan Guru PAUD tentang Kurikulum 2013. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini 6 (2), 114-124*, retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/pgpaudtrunojoyo/article/view/6153>
- Nurmalasari, I., dan Syah, M. (2019). Manajemen Personalia dalam Pemberdayaan Sekolah di SMP Muslimin 5 Kota Bandung. *Jurnal Kependidikan 7 (1), 68-83*, DOI: <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2756>
- Nurmalasari, I., dkk. (2019). Staffing dan Fenomena Rangkap Jabatan di Sekolah Islam. *Journal of Islamic Educational Management 2 (1), 14-22*, DOI: <https://doi.org/10.32940/mjiem.v2i1.111>
- Prasista, B.A. dkk. (2017). Analisis Efektivitas dan Dampak Rangkap Jabatan dalam Peningkatan Kinerja Organisasi pada PT. Harta Ajeg Lestari, di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng. *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha 8 (2), 1-10*, DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.10530>
- Rahelly, Y. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Selatan. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 12 (2)*. DOI: <https://doi.org/10.21009/JPUD.122.19>
- Rosida, W., dan Nurzaima. (2020). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Pada Paud Nurul Maghfirah Kota Kendari. *Edum Journal, 3(1), 72-78*. Retrieved from <https://edum.unwir.ac.id/index.php/edumjournal/article/view/51>.
- Sakti, S.A. (2021). Persepsi Orang Tua Siswa terhadap Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid19 di Yogyakarta. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6 (1), 73-81*, DOI: [10.31004/obsesi.v6i1.804](https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.804)
- Satrianingrum, A.P. dan Prasetyo, I. (2021). Persepsi Guru Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring di PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5 (1), 633-640*, DOI: [10.31004/obsesi.v5i1.574](https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.574).
- Widiastuti, A. A. (2018). Implementasi Standar Sarana dan Prasarana di Lembaga Taman Penitipan Anak. *PAUDIA 7 (1), 139-138*, DOI: <https://doi.org/10.26877/paudia.v7i1.3462>
- Yeni, D.I, dkk. (2020). Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Sehat Anak Usia Dini: Studi Evaluasi Program CIPP. *MURHUM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (2), 1-15*. Retrieved from

<https://murhum.ppjpaud.org/index.php/murhum/article/view/9>.